

**KONVERGENSI PERKEMBANGAN INDUSTRI
DI PULAU JAWA (2009-2014)**

DRAFT SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Pasundan Bandung

Disusun Oleh :

Sheny Yulianty

124030028



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2016**

**KONVERGENSI PERKEMBANGAN INDUSTRI
DI PULAU JAWA TAHUN 2009-2014**

DRAFT SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Pasundan Bandung

Disusun Oleh :

Sheny Yulianty

124030028

Bandung, Agustus 2016

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

(Dikdik Kusdiana.SE.,MT.)

Ketua Program Studi,

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Atang Hermawan. SE., Msie.AK)

(Dr.H.T Saepudin.SE.,Msi)

ABSTRAK

Pulau Jawa merupakan daerah dengan konsentrasi industri tertinggi di Indonesia yang diukur dari indikator jumlah tenaga kerja industri di Pulau Jawa (2009-2014), pada penelitian ini juga digambarkan bahwa setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda baik perbedaan SDM, SDA bahkan sumber dana di masing-masing daerah, hal tersebut memicu adanya kesenjangan pada daerah-daerah di Pulau Jawa. Namun, kesenjangan tersebut akan semakin berkurang jika daerah yang tertinggal cenderung berusaha mensejajarkan kondisi perekonomiannya dengan daerah yang lebih maju. Hal ini disebut konsep konvergensi.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kecenderungan konvergensi β absolut dan kondisional, serta untuk mengetahui pengaruh prediktor lain selain variabel lag yang mempengaruhinya yaitu tingkat pendidikan dan investasi terhadap perkembangan industri. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *views 6*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *panel data* dengan pendekatan *fixed Effect*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses konvergensi, baik konvergensi β absolut maupun β kondisional dengan kecepatan konvergensi masing-masing adalah 28.77% dan 73.4% per tahun. Variabel pendidikan dan investasi yang merupakan prediktor lain dalam konvergensi β kondisional, berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong proses konvergensi perkembangan industri tersebut.

Kata Kunci: *konvergensi; perkembangan industri; tenaga kerja industri; tingkat pendidikan; investasi*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro 2006).

Menyambung pernyataan diatas dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi untuk mengukur seberapa besar kenaikan produksi barang dan jasa saja dalam kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi, namun juga menambahkan pengukuran perubahan kegiatan ekonomi seperti peningkatan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan memaksimalkan penggunaan investasi.

Karakteristik sumber daya di berbagai daerah di Indonesia merupakan hal yang mempengaruhi kualitas pembangunan ekonomi tersebut di masing-masing daerah, selain itu Sumber Daya Alam yang melimpah ataupun Sumber Daya Manusia yang mempunyai kualitas yang baik, sebagian besar cenderung terpusat di beberapa daerah saja. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, sehingga akan berdampak terjadinya ketimpangan antar daerah

yang menunjukkan terdapat beberapa daerah yang akan lebih cepat tumbuh dibanding daerah lainnya.

Uraian diatas mempunyai relasi dengan kondisi Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang relatif banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2014 jumlah penduduk di Indonesia mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Sementara menurut CIA (*Central Intelligence Agency*) *World Fact book* tahun 2014, Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat.

Dengan kondisi seperti ini, sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi, seharusnya seluruh penduduk di Indonesia dapat berkerjasama untuk membangun ekonomi negara ini kearah yang lebih baik, dengan tidak terlepas dari intervensi pemerintah sebagai pemangku kebijakan utama pembangunan tersebut. Namun, apabila kondisi ini tidak dapat dimaksimalkan dengan baik, hal ini akan menjadi bumerang yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan karena pertumbuhan ekonomi akan terpusat di beberapa daerah saja.

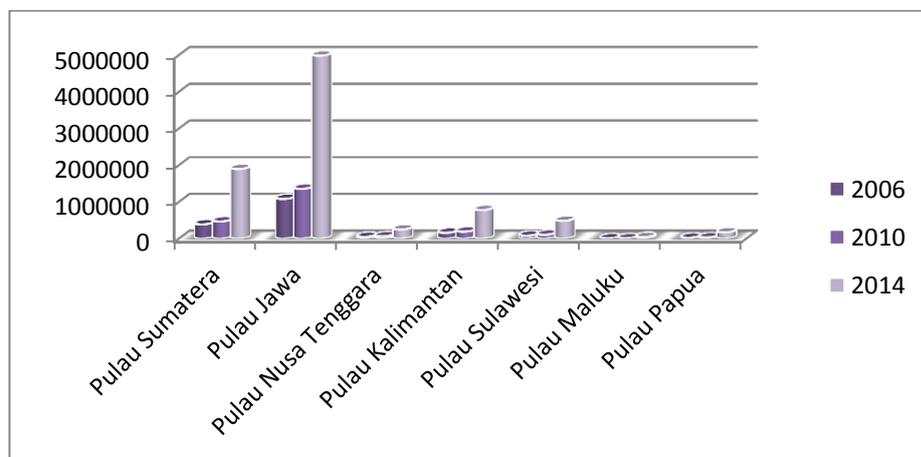
Salah satu konsep ukuran untuk menghitung angka ketimpangan sebagai salah satu landasan pembuatan kebijakan adalah Indeks Williamson. Menurut pernyataan dan hasil evaluasi yang dipublikasikan oleh Bappenas mengemukakan bahwa Indeks Williamson rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar Provinsi di Indonesia selama periode 2010 - 2014 mencapai hingga angka 0,7. Berdasarkan kriteria HT. Oshima, menggambarkan bahwa Indonesia berada pada ukuran

ketimpangan Indeks Williamson taraf tinggi selama tahun 2010-2014 karena dengan nilai Indeks Williamson diatas 0,50.

Fenomena yang terkait mengenai ketimpangan tersebut adalah isu konsentrasi pembangunan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Ketimpangan Jawa-luar Jawa di berbagai bidang merupakan “hilir” corak pembangunan warisan kolonial. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan Jawa sebagai epi sentrum pemerintahan dan ekonomi Hindia Belanda sejak awal abad 18, tapi pemerintahan Indonesia merdeka tidak melakukan rekonstruksi dan koreksi menyeluruh terhadap paradigma pembangunan kolonial itu. (Israr Iskandar,2011).

Faktanya, kita dapat melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengenai nilai PDRB pada 7 kelompok pulau besar di Indonesia, seperti pada Gambar 1.1.



Sumber : BPS Indonesia, 2014 (Data Diolah)

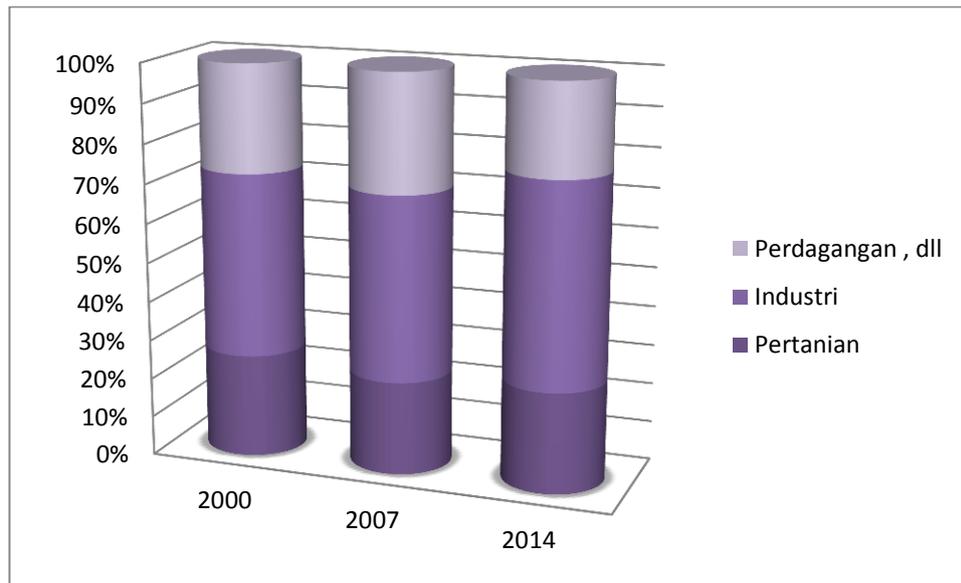
Gambar 1.1
Nilai PDRB pada Tujuh Kelompok Pulau Besar di Indonesia
(Juta Rupiah)

Pada Gambar 1.1 terlihat bahwa Pulau Jawa dan Pulau Sumatera merupakan dua kelompok besar yang mempunyai nilai PDRB terbesar di Indonesia. Sementara, Pulau Maluku dan Papua merupakan pulau dengan nilai PDRB terendah. Nilai PDRB Pulau-pulau tersebut mempunyai perbedaan yang begitu timpang antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya.

Kuncoro (2002) menyatakan bahwa konsentrasi dan ketimpangan merupakan ciri yang paling mencolok dari aktivitas ekonomi secara geografis. Konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan suatu proses yang selektif, dan hanya terjadi pada kasus tertentu bila dipandang dari segi geografis. Hal ini dapat dipahami, karena aktivitas ekonomi di satu wilayah akan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dari wilayah tersebut.

Sektor industri merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian. Selain berfungsi sebagai *engine of growth* (mesin pertumbuhan), mengingat hampir setengah dari produksi barang bertumpu pada sektor ini, kemajuan dan kesinambungan industri juga merupakan suatu prestise dari negara, terlebih bagi negara-negara maju. Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Jepang merupakan negara-negara maju yang bertumpu pada sektor industri ini (Rian Hilmawan,2013).

Menyambung pada fenomena ketimpangan pertumbuhan tersebut, dapat direpresentasikan bahwa industri merupakan sektor yang berkontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia. Maka pada gambar 1.2 akan digambarkan mengenai tiga sektor andalan Indonesia, termasuk sektor industri.



Sumber :BPS Indonesia (Data Diolah)

Grafik 1.3

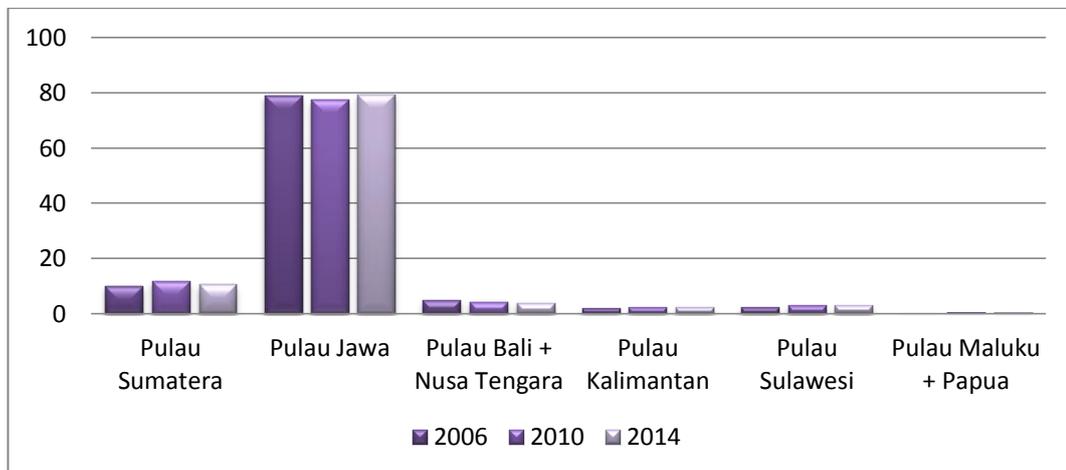
**Kontribusi Tiga Sektor Terbesar terhadap PDB Indonesia
(Menurut Harga Konstan Tahun 2000)**

Gambar diatas menggambarkan bahwa kontribusi sektor Industri dari tahun 2007 hingga 2014 masih menjadi primadona yang menyumbang PDB Indonesia. Maka tidak mengherankan jika pembangunan sektor industri terus dilakukan demi mendorongnya tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai indikator dari kinerja pembangunan ekonomi. Namun, hal ini juga akan menimbulkan dampak negatif, karena pembangunan kawasan industri terkonsentrasi di pulau Jawa. Mengingat Infrastruktur, SDM dan investasi yang lebih melimpah berada di pulau Jawa.

Menurut **Sadono Sukirno** (2002) industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara umum dimana industri diartikan sebagai perusahaan yang

menjalankan operasi dibidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Sedangkan yang selanjutnya adalah pengertian dalam teori ekonomi, dimana industri diartikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam suatu pasar.

Sementara, menurut **Zainal** (2003), dalam penelitiannya merepresentasikan pertumbuhan tenaga kerja industri sebagai ukuran dari tingkat pertumbuhan atau perkembangan industri di suatu daerah. Maka dapat digambarkan perkembangan industri pada tujuh kelompok pulau besar di Indonesia dengan indikator jumlah tenaga kerja industri yang tertera dalam gambar 1.3.



Sumber : BPS,2016 (Data diolah)

Gambar 1.3
Distribusi Tenaga Kerja Industri
pada Tujuh Kelompok Pulau Besar di Indonesia

Konsentrasi industri terlihat pada gambar 1.3 yang digambarkan melalui distribusi jumlah tenaga kerja sektor industri pada tujuh kelompok pulau besar di Indonesia tersebut teridentifikasi bahwa industrialisasi bias terhadap pulau Jawa.

Dari masalah-masalah diatas, pada mulanya pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sentralisasi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Pelaksanaan sistem sentralistik di Indonesia membuat Pulau Jawa sebagai pusat pembangunan nasional dengan alasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang tersedia lebih baik dibandingkan yang tersedia di pulau Jawa. Hal tersebut diharapkan kemajuan yang telah tercapai di Pulau Jawa dapat diikuti dengan kemajuan yang terjadi di pulau-pulau luar Jawa atau lebih dikenal dengan istilah *trickledown effect* (Tambunan,2001).

Namun, kebijakan sentralistik tersebut tidak serta merta memungkinkan pemerintah dalam menjalankan usahanya, sehingga daerah-daerah lainnya menuntut adanya pemerataan melalui pengelolaan yang dilakukan masing-masing oleh daerahnya sendiri yang dikenal dengan konsep desentralisasi atau otonomi daerah. otonomi daerah ditetapkan dalam Undang-undang No. 25/Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang No.32/Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi diserahkan pengelolaannya kepada masing-masing daerah, sementara pemerintah pusat hanya sebagai pengawas.

Kebijakan otonomi ini memberikan kesempatan kepada daerah yang relatif masih tertinggal untuk dapat mesejajarkan diri dengan daerah yang relatif lebih maju melalui dorongan terhadap perkembangan industri yang dipengaruhi oleh

beberapa prediktor perkembangan industri tersebut, seperti pendidikan dan investasi. Proses pengejaran ini dikenal sebagai konsep konvergensi.

Konvergensi adalah terjadinya penurunan perbedaan pendapatan per kapita dari negara atau wilayah miskin dengan negara atau kaya yang didasarkan atas pertumbuhan ekonomi mereka yang sangat cepat (Abramovitz, 1986), pada penelitian ini, perbedaan pendapatan perkapita tersebut diaplikasikan pada perbedaan perkembangan industri yang diukur dari jumlah tenaga kerja industri dari masing-masing provinsi di Pulau Jawa periode 2009-2014, sehingga dalam konsep konvergensi ini, kondisi perkembangan industri di Pulau Jawa berada pada titik yang konvergen.

Untuk melihat hal tersebut terdapat dua jenis konvergensi beta, pertama konvergensi absolut dan kedua konvergensi kondisional. Konvergensi absolut dilihat dengan tanpa memasukkan variabel kontrol yang merupakan karakteristik masing-masing daerah. Sedangkan konvergensi kondisional memasukkan variabel kontrol yang merupakan karakteristik masing-masing daerah (Gina,2014).

Melalui penelitian ini akan terlihat bagaimana perkembangan industri, apabila perkembangan industri ini semakin berkembang pada daerah yang tertinggal di Pulau Jawa, maka perkembangan industri ini teridentifikasi menciptakan suatu proses pergerakan ekonomi yang semakin konvergen, sehingga tujuan umum penelitian ini adalah mencoba mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri di Pulau Jawa, dan mencoba menganalisis kecenderungan konvergensi.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, dan untuk menjawab fenomena-fenomena tersebut, maka, penulis akan meneliti fenomena tersebut dalam judul “**Konvergensi Perkembangan Industri di Pulau Jawa Tahun 2009-2014**”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah terjadi kecenderungan konvergensi β absolut di Pulau Jawa (2009-2014)?
2. Apakah terjadi kecenderungan konvergensi β kondisional dan faktor apa sajakah yang mendukung konvergensi β kondisional di Pulau Jawa (2009-2014)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi kecenderungan konvergensi β absolut di Pulau Jawa (2009-2014)
2. Untuk mengidentifikasi kecenderungan konvergensi β kondisional dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung konvergensi β kondisional di Pulau Jawa (2009-2014).

1.4 Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian, yaitu :

1. Manfaat akademis, dapat memberikan tambahan informasi dalam wacana akademik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

sehingga dapat dijadikan referensi serta perkembangan dalam penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat membantu pihak-pihak perumus atau pun bagi para pengambil keputusan di pemerintah yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.
3. Untuk penulis, manfaat untuk melengkapi program perkuliahan S1, program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan dan sebagai salah satu media latihan untuk mengembangkan kemampuann dan keterampilan sesuai disiplin yang dipelajari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Dalam menganalisis Konvergensi Perkembangan Industri di Pulau Jawa Tahun 2009-2014, penelitian ini didasarkan pada teori dan referensi yang relevan sehingga tercapainya penelitian yang ilmiah.

2.1.1 Konvergensi

Secara umum pengertian konvergensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai alat analisis untuk melihat pergerakan suatu perekonomian daerah tertinggal yang cenderung mengejar atau mensejajarkan perekonomian dengan daerah yang lebih maju. Dalam penelitian ini, konsep konvergensi tersebut diaplikasikan pada perkembangan industri di Pulau Jawa (2009-2014).

2.1.1.1 Teori dan Konsep Konvergensi

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik, konvergensi adalah kondisi dimana daerah tertinggal yang belum mencapai kemapanan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah maju yang telah mencapai kemapanan. Teori konvergensi menyatakan bahwa tingkat kemakmuran yang dialami oleh daerah-daerah maju dan daerah-daerah berkembang pada suatu saat akan konvergen (bertemu pada satu titik). Ilmu ekonomi juga menyebutkan bahwa akan

terjadi *catching up effect*, yaitu ketika daerah-daerah berkembang berhasil mengejar daerah-daerah maju (Tajerin 2007).

Terdapat dua konsep konvergensi, yaitu σ *convergence* dan β *convergence*. Konsep yang pertama fokus pada dispersi yang dapat diukur dengan misalnya, standard deviasi dari logaritma pendapatan atau produk per kapita antardaerah. Jika nilainya menunjukkan penurunan antarwaktu maka konvergensi pendapatan terjadi. Namun, jika nilainya tidak menunjukkan penurunan maka konvergensi tidak terjadi. Sedangkan konsep yang kedua menyatakan perekonomian miskin mampu mengejar (*catch up*) perekonomian kaya dalam hal pendapatan atau produk per kapita (Barro dan Sala-i Martin, 2004 dalam Nisa, 2012)

Dari beberapa pengertian diatas, dalam penelitian ini, penulis memilih konsep beta konvergensi saja dalam menganalisis pergerakan perkembangan industri di Pulau Jawa (2009-2014), secara empiris hal ini dimaksudkan, karena perhitungan melalui beta konvergensi dapat melihat bagaimana beberapa variabel yang mempengaruhinya, baik variabel independen yang bersifat konstan maupun prediktor lain yang menjadi karakteristik beberapa daerah.

Konsep β *convergence* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *absolute convergence* dan *conditional convergence*. Konvergensi absolut terjadi ketika pengukuran konvergensi didasarkan pada tingkat pendapatan awal saja. Sedangkan konvergensi kondisional menambahkan beberapa variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan karakteristik yang menentukan tingkat kondisi mapan masing-masing perekonomian. Dengan demikian konvergensi kondisional

menyatakan bahwa perekonomian akan konvergen pada kondisi mapan masing-masing yang dipengaruhi oleh berbagai variabel kontrol seperti tingkat tabungan dan pertumbuhan populasi (Barro dan Sala-i Martin, 2004 dalam Nisa 2012).

2.1.1.2 Kriteria Konvergensi

Terjadinya proses konvergensi dapat diukur melalui kriteria yang didasarkan model penelitian yang dilakukan oleh Mutaqin dan Ichihashi (2012) dalam Manda (2013) yang akan dijelaskan lebih rinci di bab selanjutnya, yang apabila diringkas, dapat ditemukan kriteria terjadinya konvergensi sebagai berikut:

- Jika nilai β berada diantara 0 dan -1, artinya dapat dikatakan terjadi konvergensi
- Jika Semakin mendekati -1 maka perkembangan industri di Pulau Jawa akan semakin konvergen.
- Jika $(1+\beta) < 1$, maka teridentifikasi terjadinya konvergensi

2.1.2 Industri

2.1.2.1 Pengertian Industri

Berdasarkan Undang-undang Indonesia No. 5 tahun 1984, yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi nilai penggunaannya termasuk rekayasa industri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984, menyatakan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara eimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia dan dana yang tersedia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

2.1.2.2 Jenis-jenis industri

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, 2015, jenis-jenis industri dapat pisahkan pada beberapa golongan yang terlihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.1

Penggolongan Industri Berdasarkan Skalanya

Jenis Industri	Jumlah Tenaga Kerja
Besar	≥ 100 orang
Sedang	20 – 99 orang
Kecil	5 – 19 orang
Rumah Tangga	1 – 4 orang

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.1.2.3 Implementasi perkembangan industri

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zainal (2003) dengan judul Dinamika Spasial, Industri Manufaktur di Jawa Barat, Tahun 1990-1999 menjelaskan mengenai konsentrasi industri di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat didasarkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja sektor industri di berbagai daerah di Jawa Barat.

Penelitian tersebut dapat menjadi referensi bagi penulis untuk menentukan variabel dependen konsentrasi industri, yakni dengan menentukan banyaknya jumlah tenaga kerja industri manufaktur yang tersebar di berbagai daerah, yang mencerminkan bahwa semakin banyak jumlah tenaga kerja industri manufaktur di suatu daerah, maka teridentifikasi terjadi kecenderungan aglomerasi industri di daerah tersebut.

2.1.3 Tenaga Kerja Industri

2.1.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 1 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Mulyadi, 2008 mengemukakan bahwa Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk

dalam satu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2.1.3.2 Teori Ketenagakerjaan

Menurut Fei-Rains (1961) dalam Mulyadi (2008) menyatakan bahwa ada tiga tahap dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, dimana pengangguran semu dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerjaan pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, dimana tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus.

2.1.3.3 Kebijakan dalam Ketenagakerjaan

Penyebaran tenaga kerja telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah agar terjadinya pemerataan penyebaran tenaga kerja baik secara regional maupun sektoral.

Secara regional pembangunan perusahaan-perusahaan industri diberbagai daerah di Indonesia, diharapkan akan mendorong persebaran tenaga kerja di sektor industri lebih merata dari setiap periodenya. Sementara dari segi sektoral, pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri terus ditingkatkan, hal ini untuk mendorong nilai tambah sehingga dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Pendidikan

2.1.4.1 Pengertian Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar “didik” (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), ada dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT. Sementara, Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta

pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan merupakan salah satu variabel yang berkontribusi dengan baik terhadap pertumbuhan ekonomi atau secara lebih spesifik dalam penelitian ini adalah perkembangan industri.

Mengacu pada konsep pendidikan diatas, teori *human capital*, mendukung pernyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu variabel terpenting baik dalam pertumbuhan di sektor industri manufaktur maupun pertumbuhan ekonomi secara umum, yang mengasumsikan bahwa produktivitas yang tinggi bersumber pada skil dan pengetahuan manusia yang dibentuk melalui pelatihan dan pendidikan formal. Apabila produktivitas kerja tinggi, maka akan menghasilkan output yang baik hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.2 Ukuran Pendidikan

Sebagai salah satu indikator dari pendidikan, APS dapat menggambarkan seberapa besar usia produktif di Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam konteks mendorong pertumbuhan output di sektor industri. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai perhitungan dan interpretasinya:

$$APS (15-18) = \frac{\text{Jumlah penduduk berumur 15-18 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah penduduk umur 15-18 tahun}} \times 100$$

Interprestasi:

Misalkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 15-18 tahun di Daerah X, sebesar 87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 13 persen

penduduk berusia 15-18 tahun yang tidak mendapatkan pendidikan formal di sekolah.

2.1.4.3 Hubungan Pendidikan dan Perkembangan Industri

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan keterkaitan dengan kualitas manusia. Berdasarkan referensi teori *Human Capital*, pada dasarnya kualitas manusia yang dilatih, salah satunya melalui pendidikan formal akan menghasilkan output dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Output yang dihasilkan tersebut hingga akhirnya memungkinkan terjadinya akumulasi modal dengan membangun perusahaan-perusahaan industri baru, hingga membuka kesempatan kerja baru dan akhirnya berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan tenaga kerja pada sektor tersebut.

2.1.5 Investasi

2.1.5.1 Pengertian Investasi

Menurut UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 angka (1) mengartikan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dari definisi di atas maka pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan penanaman modal baik berupa uang atau aset-aset lainnya dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) jenis-jenis investasi yaitu sebagai berikut :

a. Penanaman Modal Asing

Pasal 1 angka (3) dirumuskan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam Pasal 1 angka (8) menguraikan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri

Dalam Pasal 1 angka (9) menguraikan bahwa modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Dari kedua pengertian diatas, dalam penelitian ini penulis mengpliasikan Penanaman Modal Asing dalam kaitanya dengan analisis konvergensi ini. Fuchs & Pernia (1989) dalam zainal (2003) mengatakanbahwa beberapa studi mengenai geografiinvestasi Jepang di Inggris dan Australia menemukan bahwa investor

asing pada umumnya lebih memilih untuk menanam investasi dalam daerah-daerah inti (*core regions*) dan daerah sekitarnya yang berdekatan.

2.1.5.2 Manfaat Investasi atau Penanaman Modal

Dalam **Undang-Undang No 25 Tahun 2007** tentang Penanaman Modal dijelaskan tentang manfaat investasi atau tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b) Menciptakan lapangan kerja
- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.3 Hubungan Investasi dengan Perkembangan Industri

Investasi akan memberikan kesempatan pada suatu perusahaan industri untuk mampu mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha ini harus didukung

oleh teknologi bahkan Sumber Daya Manusianya guna menciptakan tingkat produktivitas yang tinggi dengan adanya penambahan modal dari investasi.

Sesuai dengan referensi dari teori Harrod Domard mengenai investasi, pada initinya, tingkat investasi di suatu daerah akan menyebabkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor di beberapa daerah, hingga terciptanya pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat investasi menyebabkan semakin banyak kesempatan tenaga kerja membuat semakin tinggi pertumbuhan tenaga kerja khususnya di sektor industri.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kovergensi yang relevan dengan konvergensi pertumbuhan tenaga kerja antar pulau di Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya, antara lain;

A. Gina Ratna Suminar

Hasil penelitian Gina Ratna Suminar (2014), Jurusan Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor yang berjudul “ Konvergensi Penyerapan Tenaga Kerja Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”, salah satu tujuannya ialah menguji apakah kestabilan penyerapan tenaga kerja menuju ke kestabilan yang konvergen dan mengestimasi faktor-faktor yang mendukung proses konvergensi penyerapan tenaga kerja antarkabupaten/kota di Jawa Barat sehingga diketahui faktor-faktor yang dapat didorong untuk membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja terutama bagi daerah tertinggal agar dapat mengejar ketertinggalannya dengan penerapan metode Sys-GMM. Hasilnya, telah terjadi

konvergensi penyerapan tenaga kerja yang dilihat dari hasil estimasi nilai koefisien yang lebih kecil dari satu. Melalui penelitian ini juga ditemukan bahwa investasi sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap konvergensi penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

B. Manda Khairatul Aulia

Hasil penelitian Manda Khairatul Aulia(2013), Jurusan Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor yang berjudul “ Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN+3 dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi”, salah satu tujuannya ialah menguji apakah kestabilan pendapatan negara-negara ASEAN+3 menuju ke kestabilan yang konvergen jika dianalisis dengan menggunakan analisis data panel. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan estimasi *fixed effects model* dengan *weighted statistic*. Hasilnya menunjukkan telah terjadi proses konvergensi beta absolut dan kondisional karena koefisien lag variabel dependen sebesar -0.1 dan -0.2 berada diantara -1 dan 0, sementara proses konvergensi yang terjadi cenderung lama dengan tingkat konvergensi 10% untuk konvergensi absolut dan 20% untuk konvergensi kondisional.

C. Zainal Arifin

Hasil penelitian Zainal Arifin (2003), Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “ Dinamika Spasial Industri Manufaktur di Jawa Barat, tahun 1990-1999”, salah satu tujuannya ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya proses

konvergensi pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan analisis data panel melalui teknik OLS (*Ordinary Least Square*). Hasilnya, menunjukkan bahwa laju konvergensi absolut adalah 6,30 persen per tahun. Pada laju konvergensi kondisional, besarnya laju konvergensi adalah 4,10 persen per tahun. Dua variabel yang mempengaruhinya adalah Penanaman Modal Asing dan IPM yang bersama-sama berpengaruh

D. Unggul Heriqbaldi

Hasil penelitian Unggul Heriqbaldi (2009) yang berjudul “Konvergensi Tingkat Pendapatan Studi Kasus 3 Propinsi di Pulau Jawa”, menyatakan bahwa dalam jurnal tersebut dibahas mengenai konvergensi tingkat pendapatan dengan menggunakan dua konsep analisis konvergensi, yaitu;

β-convergence dan σ-convergence. Pada penelitian ini membuktikan bahwa tidak terjadi konvergensi antara tiga provinsi di Pulau Jawa tersebut, karena setiap kenaikan PDRB kabupaten di beberapa provinsi tersebut disertai dengan pertumbuhan PDRB daerah yang justru semakin menambah ketimpangan di tiga daerah ini.

2.3. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran adalah bagian dari landasan teori dengan tujuan menganalisis masalah dalam penelitian dengan menunjukkan beberapa teori yang

relevan dengan tujuan penelitian dan untuk melihat hasil olahan data empiris dari peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka, maka penulis memilih variabel pendidikan dan investasi sebagai variabel independen yang mempengaruhi perkembangan industri yang diukur dari banyaknya tenaga kerja industri variabel dependennya.

2.3.1 Pengaruh pendidikan terhadap Perkembangan Industri

Pendidikan merupakan modal manusia utama dalam memperbaiki taraf hidupnya. **Niken** (2010) menyatakan sehebat apapun teknologi, peralatan, dan dana yang tersedia, SDM tetap merupakan faktor kunci yang paling berperan. Rendahnya kualitas SDM menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, hal tersebut membuktikan ada keterkaitan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi atau dalam hal ini perkembangan industri.

Pendidikan yang baik tentu akan meningkatkan produktivitas kinerja dari SDM sektor modern ini, sehingga menghasilkan output yang lebih, semakin banyak output yang dihasilkan dan semakin banyak permintaan akan output tersebut, akan mendorong pertumbuhan tenaga kerja. Pada penelitian yang dilakukan **Niken** (2010), dapat disimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pendidikan relevan dengan peningkatan meningkatnya PDRB di semua sektor, terutama industri sebagai sektor utama yang dipengaruhi oleh peningkatan tingkat pendidikan yang terlihat dari jumlah output dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada saat terjadi peningkatan pendidikan.

Penelitian empiris oleh **Prasasti** (2006) dalam judul “Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi di Indonesia Periode 1993-2003”, menemukan pengaruh yang positif variabel independen tingkat pendidikan terhadap variabel dependen percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga mempercepat terjadinya konvergensi pendapatan.

2.3.2 Pengaruh Investasi terhadap Perkembangan Industri

Rini (2012) mengungkapkan bahwa secara teoritis, tingkat pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan investasi seperti yang dinyatakan antara lain oleh **Keynes dalam Jhingan** (2003) dan **Mankiw** (2006), **Harrod Domar dalam Arsyad** (2010), **Solow-Swan dalam Arsyad** (2010), **Kuznet dalam Arsyad** (2010), **Todaro** (2006), dan **Schumpeter** dalam **Sukirno** (2008). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pertumbuhan tenaga kerja.

Menurut **Lewis** dalam **Todaro** (2006), pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dimulai dari investasi di sektor industri, dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan output pada sektor modern tersebut. Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern.

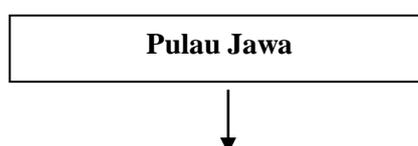
Tulus (2014) menyatakan bahwa model dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori Keynes, mengenai keseimbangan pertumbuhan

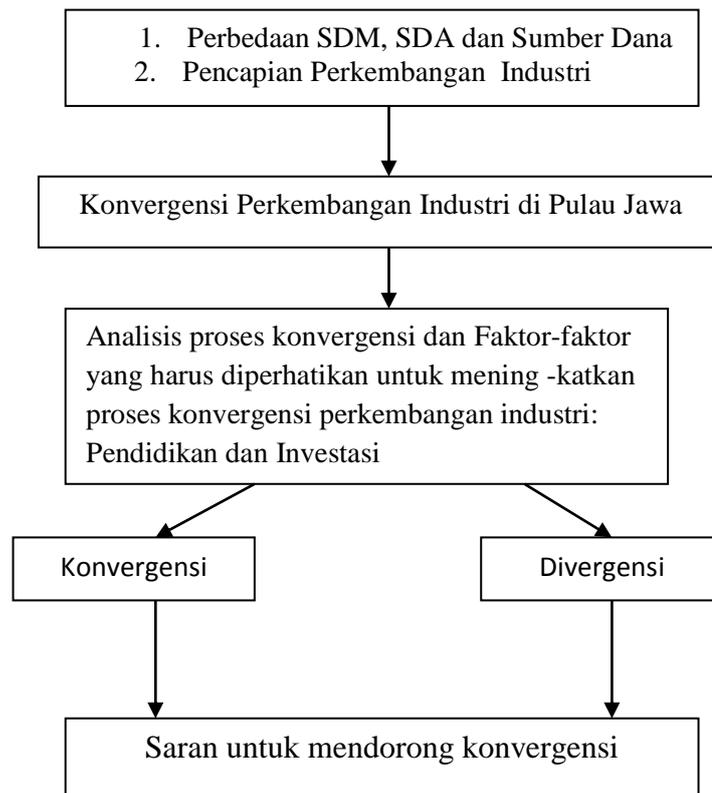
ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi, baik pada permintaan agregat, maupun pada perluasan produksi atau penawaran agregat. Perluasan produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perluasan produksi di sektor industri untuk mendorong pertumbuhan pertumbuhan tenaga kerja industri manufaktur.

Tulus (2014) menambahkan bahwa dalam teori modern, faktor-faktor produksi yang krusial tidak hanya banyaknya tenaga kerja dan modal, tetapi juga kualitas SDM dan kemajuan teknologi (yang terkandung di dalam barang modal atau mesin), energi (khususnya energi alternatif), kewirausahaan, bahan baku dan material.

Ada perbedaan pengertian mengenai SDM menurut perspektif teori neo-klasik dan modern. Teori modern memfokuskan diri pada kualitas tenaga kerja dalam arti pendidikan bukan kuantitasnya. Sementara teori neo-klasik memfokuskan pada kuantitas tenaga kerja. Penelitian empiris oleh **Putu dan Komang** (2013) dalam judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Inflasi terhadap Nilai Produksi pada Sektor Industri” menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara variabel investasi terhadap nilai produksi. Artinya Jika jumlah investasi naik, maka nilai produksi pada sektor industri kecil juga akan naik dengan asumsi variabel lain konstan.

Berdasarkan uraian diatas maka hubungan antara variabel dependen dan independen dapat dilihat pada gambar 2.3.





Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan permasalahan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terjadi konvergensi absolute dan kondisional dalam perkembangan industri di Pulau Jawa (2009-2014) dengan nilai koefisien variabel lag sebesar $(1+\beta) < 1$.
2. Pendidikan diduga berpengaruh positif dalam meningkatkan kecepatan konvergensi absolut dan kondisional dalam perkembangan industri di Pulau Jawa (2009-2014)
3. Investasi diduga berpengaruh positif dalam meningkatkan kecepatan konvergensi absolut dan kondisional dalam perkembangan industri di Pulau Jawa (2009-2014)

DAFTAR PUSTAKA

- Abramovitz, Moses. (1986). *Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind*. *Journal of Economic History* June 1986 pp. 385-405.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin Zainal. 2003. *Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Berbasis Perikanan Di Jawa Timur (Studi Kasus Industri Besar Dan Sedang)*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)
- Barro Dan Sala-I Martin, 2004 Dalam Nisa, 2012. *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Konvergensi Pendapatan Di Pulau Sumatera*.
- Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat..
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gina Ratna Suminar (2014) “*Konvergensi Penyerapan Tenaga Kerja Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*”
- Hastuti, Niken Dan Haryanto, Mulyo. 2010. “*Analisis Pengaruh Periode Perputaran Persediaan, Periode Perputaran Hutang Dagang, Rasio Lancar, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada: Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2006-2008)*.”
- HT. Oshima (Sutawijaya, 2004). *Analisis Disparitas Pendapatan Antardaerah dan Potensi Relatif Secara Sektoral*. Dalam STEI. No. 03. Hal. 34 - 51
- Israr Iskandar. 2011. “*Local Politic Dynamics, Nation Integration and History Learning Challenge*”
- Imam Ghozali. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Kuncoro. 2002. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ekonisia

- Mulyadi. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mutaqin Dan Ichihashi, 2012 Dalam Manda, 2013. *Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi*.
- Mutaqin Z, Achihashi M. 2012. *The Role Of Maastricht Criteria And Membership In Determining Convergence In The Eurozone And Asean: A Panel Data Analysis*. Japan (Id): Hiroshima University.
- Prasasti, Diah. *Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi Di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional Dan Konvergensi*
- Putu Dan Komang. 2013. “*Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Inflasi Terhadap Nilai Poduksi Pada Sekor Industri*”
- Rian, Hilmawan (Universitas Mulawarman) *Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2008 – 2013*
- Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Mikro Ekonomi*. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta.
- Sulistiawati, Rini. *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 2012, Vol. 3, No. 1, 29-50*
- Tajerin. 2007. *Peranan Teknologi Dalam Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antardaerah Pesisir Di Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta (Id): Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12, 179-194.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro MP, Smith SC. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan. Jakarta (ID): Erlangga.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Direvisi Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Widarjono, Agus, 2006. *Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: UI

Zainal Arifin 2003 “*Dinamika Spasial Industri Manufaktur di Jawa Barat 1990-1999*”. E-JURNAL EP Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 8 No.2 Hal: 111-12